

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks. Tidak dipungkiri masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang tidak mudah untuk diatasi. Beragam upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya tetapi hal tersebut tidak membuat Indonesia terhindar dari masalah kemiskinan. Sering kita temui di sudut-sudut kota terdapat pemukiman masyarakat miskin. Masalah kemiskinan bisa dibilang menjadi masalah Negara yang semakin berkembang setiap tahunnya dan pemerintah sampai sekarang belum mampu mengatasi masalah tersebut. Kemiskinan bukan merupakan isu yang baru namun kemiskinan menjadi isu yang seolah-olah abadi. Kemiskinan seringkali ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Masyarakat miskin identik dengan ketidakberdayaan dan ketertinggalan taraf hidup dibandingkan dengan masyarakat lainnya.

Kemiskinan di Indonesia terjadi di berbagai tempat baik perkotaan maupun pedesaan. Di kota-kota besar, dari jendela gedung-gedung bertingkat yang megah dalam segala kemewahannya, kita dapat memandang deretan perkampungan kumuh di seberangnya. Bandung merupakan wilayah Indonesia yang disebut sebagai kota besar. Bandung sebagai kota metropolitan nyatanya masih terdapat masyarakat yang miskin. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia, kemiskinan di Bandung adalah fenomena kemiskinan kota . dimana penduduk miskin cenderung terkumpul pada daerah pemukiman kumuh, bantaran kali. Alasan mengapa penduduk miskin umumnya bertempat tinggal pada daerah-daerah tersebut karena wilayahnya relatif sesuai dan mudah untuk ditempati dengan kondisi kemiskinan yang serba kekurangan. Berbekal aset atau uang seadanya dan bahkan barang-barang bekas (seng, papan, dan sebagainya) mereka dengan mudah membangun rumah ala kadarnya di daerah-daerah tersebut. Kemiskinan di Bandung

Regiza Rossa Lediana, 2018

PERENCANAAN PROGRAM LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN JATIHANDAP KECAMATAN MANDALAJATI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

muncul sebagai akibat dari berbagai dimensi seperti tingkat pendapatan yang rendah, kondisi kesehatan yang buruk, pendidikan rendah, kerawanan atau ketidak-amanan individu dan tempat tinggal, serta ketidakberdayaan. Kondisi kemiskinan yang masih menjadikan pekerjaan bagi pemerintah.. Selama ini masih banyak program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti, pemberian bantuan, beras raskin, asuransi kesehatan keluarga miskin (Askeskin), dan bantuan langsung tunai (BLT) ataupun dengan nama lain yang saat ini menjadi trend adalah bantuan langsung tunai (BLSM). Hal ini belum mampu membantu masyarakat dari persoalan kemiskinan.

Pemerintah melaksanakan strategi kebijakan yang menysasar 40 persen penduduk termiskin, dengan perhatian khusus pada penyediaan jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perluasan akses usaha mikro, kecil, dan menengah. Program itu meliputi Program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga termiskin, rastra/bantuan pangan non-tunai dan bantuan pendidikan bagi 19,7 juta anak usia sekolah bagi keluarga sangat miskin, miskin dan rentan, bantuan iuran kesehatan bagi 92.4 juta penduduk miskin dan rentan (termasuk bayi baru lahir), subsidi energi bagi masyarakat sangat miskin, miskin dan rentan, dan perluasan kepesertaan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pemerintah fokus terhadap percepatan kepemilikan identitas hukum (akta kelahiran, NIK), terfasilitasinya akses terhadap pelayanan kesehatan untuk mengurangi angka stunting, penyediaan infrastruktur dasar: sanitasi, air minum, jalan, dan jembatan, bantuan pembiayaan KPR swadaya, sejahtera tapak, dan satuan rumah susun, serta penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (merata ke seluruh desil pendapatan), tingkat kemiskinan pada tahun 2045 dapat mendekati nol (0,02 persen). (<https://jpp.go.id/humaniora/sosial-budaya/314288-2018-pemerintah-fokus-atasi-kemiskinan-dan-ketimpangan>).

Selanjutnya Moeljarto (1995:98) mengemukakan tentang Proverty Profile sebagaimana berikut : Masalah kemiskinan bukan saja masalah Welfare akan tetapi mengandung enam buah alasan antara lain : (a) masalah kemiskinan adalah masalah kerentaan, (b) Kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja karena hubungan produksi dalam masyarakat tidak memberi peluang kepada mereka untuk berpartisipasi dalam proses produksi, (c) Masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi, emosional dan sosial dalam menghadapi elit desa dan para birokrat yang menentukan keputusan

menyangkut dirinya tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, sehingga membuatnya tidak berdaya, (d) kemiskinan juga berarti menghabiskan sebagai besar penghasilannya untuk konsumsi pangan dalam kualitas dan kuantitas terbatas., (e) tingginya rasio ketergantungan, karena jumlah keluarga yang besar, (f) adanya kemiskinan yang diwariskan secara terus menerus. Kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan yang rendah tetapi banyak hal juga seperti kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

Pemerintah sebagai pemegang aturan yang memiliki suatu kebijakan akan permasalahan ini sangat diharapkan keberadaannya oleh masyarakat. Namun persoalan kemiskinan juga diakibatkan dari kurang kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam memaknai pendidikan, sesungguhnya pendidikan itu merupakan pusat dan pembangunan manusia yang cerdas dan berkualitas, dan sangat mendorong pertumbuhan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Aspek pendidikan dianggap memiliki peranan paling penting dalam menentukan kualitas manusia. Karena melalui pendidikan, manusia dianggap akan memperoleh pengetahuan, dan dengan pengetahuannya manusia diharapkan dapat membangun keberadaan hidupnya dengan lebih baik. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam tiga jalur utama, yaitu formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan non formal memiliki peran dalam memberdayakan manusia. Dalam pendidikan nonformal terdapat pemberdayaan masyarakat. Kusnadi (2007:78) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah setiap usaha pendidikan yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran atau pengertian dan kepekaan pada warga masyarakat terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan atau politik sehingga pada akhirnya warga masyarakat memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat, atau menjadi masyarakat yang berdaya.. Berdasarkan pengertian tersebut pemberdayaan tidak terlepas dari pendidikan. masyarakat ini memiliki

makna agar orang-orang yang diberdayakan menjadi kuat atau mempunyai daya sehingga dapat hidup layak berdampingan dengan manusia lainnya. Pemberdayaan bertujuan untuk menyamaratakan masyarakat. Sehingga melalui pemberdayaan masyarakat mampu terlepas dari kondisi kemiskinan.

Pendidikan non formal memiliki layanan khusus untuk memberdayakan manusia. Menurut Sudjana (2010:1) pendidikan non formal adalah setiap usaha yang dilakukan dengan sadar, sengaja, teratur dan berencana yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan dirinya sehingga terwujud manusia yang gemar belajar-membelajarkan, mampu meningkatkan taraf hidup, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau pembangunan masyarakat. Program pemberdayaan bagi masyarakat miskin dapat berjalan dengan baik jika dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Menurut Ife dan Tesoriero (2008:410-411) masalah kemiskinan adalah masalah multidimensi dan lintas sektor yang harus ditangani secara komprehensif. Dimana diantara dimensi tersebut saling berhubungan dan terintegrasi. Ada enam dimensi penting dalam menangani kemiskinan yaitu (1) Sosial (2) Ekonomi (3) Politik (4) Budaya (5) Lingkungan dan (6) Personal/spiritual.

Menurut Sutrisno dalam Depsos RI (2005:5) penyebab kegagalan program penanggulangan kemiskinan adalah masih menggunakannya pendekatan teknokratis yang bersifat *top-down*, sehingga hal itu menyebabkan masyarakat pasif dan bergantung kepada pemerintah karena beranggapan bahwa pemerintah adalah penyedia, perencana dan pelaksana pemberdayaan. Selain itu dalam proses pemberdayaan terdapat masalah kurang sesuainya program yang dibuat pemerintah untuk masyarakat sehingga hasil dari pemberdayaan tersebut tidak berkelanjutan atau hanya bersifat sementara. Setiap program pada dasarnya harus berdasarkan kebutuhan sehingga program menjadi tepat sasaran. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukannya proses pemberdayaan terhadap masyarakat miskin sebelumnya harus mengetahui dahulu kondisi kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan wilayah itu menjadi miskin serta merencanakan program yang sesuai dengan kondisi dan penyebab kemiskinan itu terjadi.

Menurut data BPS Kecamatan Mandalajati terdapat satu kelurahan di Kecamatan Mandalajati yang memiliki jumlah masyarakat miskin terbanyak hal ini terbukti dengan adanya tabel penerima raskin berikut :

Tabel 1.1
Daftar Penerima Raskin Kelurahan Jatihandap

Kelurahan	Jumlah KK	Volume (Kg)
Jatihandap	640	9600
Karang Pamulang	380	5700
Sidangjaya	330	4950
Pasir Impun	430	6450
Jumlah	1780	16560

Sumber : BPS Kota Bandung

Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di kelurahan Jatihandap kota Bandung karena menurut BPS kelurahan Jatihandap adalah kelurahan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dibanding dengan kelurahan lainnya. Hal ini terbukti dengan banyaknya penerima Raskin di kelurahan di Jatihandap. Selain itu di kelurahan Jatihandap terdapat RW yang merupakan RW dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yaitu RW 06.

Masyarakat miskin sangat perlu untuk di berdayakan Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang berkesenimbangan untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong dan memotivasinya serta membangkitkan kesadaran akan potensinya sehingga dapat mandiri dan meningkat taraf hidupnya. Penting sekali bagi suatu daerah memberdayakan masyarakatnya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakatnya. Dimana ada pemberdayaan masyarakat yang terus maju dan berjalan maka akan terdapat masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Pemberdayaan erat kaitannya dengan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat). LPM merupakan mitra desa atau kelurahan dalam memberdayakan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yaitu, lembaga ketahanan Desa untuk selanjutnya disingkat menjadi LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat menjadi LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis berpendapat bahwa masyarakat miskin harus berdaya sehingga dapat berdampingan dengan

masyarakatlainnya maka penulis tertarik untuk memberi judul skripsi ini yaitu “Perencanaan Program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Kelurahan Jatihandap merupakan Kelurahan yang memiliki masyarakat miskin terbanyak dibanding kelurahan yang lain
- 1.2.2. Terdapat satu RW yang dianggap sebagai RW yang memiliki warga miskin terbanyak di kelurahan Jatihandap
- 1.2.3. Belum adanya pemberdayaan yang tepat bagi masyarakat miskin di Kelurahan Jatihandap
- 1.2.4. Kelurahan Jatihandap berada di wilayah kota namun masih terdapat banyak masyarakat miskin
- 1.2.5. Masih terbatasnya program serta kegiatan yang diselenggarakan dalam upaya memberdayakan masyarakat miskin

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini diuraikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

- 1.3.1. Bagaimana gambaran kemiskinan masyarakat di Kelurahan Jatihandap berdasarkan pengalaman pendidikan formal ?
- 1.3.2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan masyarakat berdasarkan pengalaman pendidikan formal di Kelurahan Jatihandap ?
- 1.3.3. Perencanaan apa yang dilakukan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) kelurahan untuk memberdayakan masyarakat miskin ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1.4.1. Untuk menggambarkan kemiskinan masyarakat di Kelurahan Jatihandap berdasarkan pengalaman pendidikan formal
- 1.4.2. Untuk menggambarkan faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan masyarakat berdasarkan pengalaman pendidikan formal di Kelurahan Jatihandap
- 1.4.3. Untuk menggambarkan perencanaan yang dilakukan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) tingkat kelurahan untuk memberdayakan masyarakat miskin.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1.5.1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan pengembangan konsep tentang pemberdayaan masyarakat miskin bagi Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

1.5.2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan memahami lebih mendalam tentang pemberdayaan masyarakat miskin

1.5.3. Bagi pemerintah sebagai rujukan dalam penyusunan program pemberdayaan masyarakat miskin

1.5.4. Bagi penulis menambah wawasan mengenai pemberdayaan masyarakat miskin

1.6 Struktur Organisasi Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan selanjutnta, maka peneliti memberikan gambaran umum tentang isi dan materi yang akan dibahas sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi uraian latar belakang, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan struktur organisasi penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang beberapa konsep yang berhubungan dengan judul dan permasalahan penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Membahas tentang Lokasi Penelitian, Desain Penelitian, Subjek Penelitian, Metode Penelitian, Instrumen Penelitian, Proses pengembangan instrument, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan penelitian

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang simpulan hasil penelitian, implikasi dan saran yang di rekomendasikan kepada pihak-pihak tertentu.

